



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Mei 2011

Nomor : 050 / 1747 / SJ
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Program Kajian BPP
Kemendagri dan BPP Provinsi
T.A 2012

Kepada
Yth. Gubernur
di -
seluruh Indonesia.

Menunjuk Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/883/SJ, tanggal 21 Maret 2011 hal Pedoman Penyusunan Program Litbang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun Anggaran 2012, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan tuntutan masyarakat akan pelayanan pemerintah yang semakin kompleks, perlu direspons secara cepat dan tepat.
2. Untuk dapat merespons secara cepat dan tepat diperlukan antara lain:
 - a. Sumber daya aparatur (kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia) yang profesional dan berkompotensi tinggi.
 - b. Dukungan anggaran yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - c. Sinergitas antardaerah guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya pembangunan.
 - d. Kreativitas kebijakan pemerintah daerah di berbagai bidang terutama dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah perdesaan.
 - e. Optimalisasi peran penelitian dan pengembangan dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan:

1. Penelitian dan pengembangan dengan kegiatan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan daerah.
2. Kegiatan pengkajian meliputi:
 - a. Kajian Kemampuan Aparatur (kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia).
 - b. Kajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
 - c. Kajian Pengembangan Kerja Sama Antardaerah.

- d. Kajian Pengembangan Desa.
 - e. Kajian/evaluasi peran penelitian dan pengembangan dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.
3. Dukungan anggaran melalui APBD Provinsi Tahun Anggaran 2012.

Terkait dengan program dan kegiatan sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atas, BPP Kemendagri sedang mempersiapkan pedoman teknis dan dalam waktu dekat akan disampaikan kepada Saudara.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Rektor IPDN, di Jatinangor, Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
4. Para Sekretaris Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Provinsi atau sebutan lain di seluruh Indonesia.